

REPUBLIK INDONESIA – JEPANG, 1951 – 1958.

Perjanjian perdamaian San Fransisco, ditandatangani pada bulan September 1951 oleh Jepang dan Negara – Negara Sekutu Barat, tetapi tidak oleh Negara – Negara komunis, telah memulihkan otonomi politik Jepang dan control atas masalah – masalah luar negerinya. Pada waktu yang sama, untuk memenuhi syarat pengakhiran pendudukan Amerika Serikat, pemerintah Jepang menyetujui rancangan perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, yang menggabungkannya ke dalam kubu Barat¹³.

Eksistensi Jepang tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan Negara – Negara lain, terutama Negara – Negara tetangga non-Komunis Asia Timur dan Asia Tenggara. Perjanjian perdamaian itu mengandung satu pasal, pasal 14, yang memungkinkan terjalannya kembali hubungan antara Jepang dengan Negara – Negara Asia Tenggara yang hampir terputus sama sekali sejak tahun 1945. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

It is recognized that Japan should pay reparations to the Allied Powers for the damage and suffering caused by it during the war. Nevertheless it is also recognized that the resources of Japan are not presently sufficient, if it is to maintain a viable economy, to make complete reparations for all such damage and suffering and at the same time meet its other obligations. Therefore Japan will promptly enter into negotiations with Allied Powers so desiring, whose present territories were occupied by Japanese forces and damaged by Japan, with a view to assisting to compensate those countries for the cost of repairing the damage done, by making available the services of the Japanese people in production, salvaging and other work for Allied Powers in question. Such arrangements shall avoid the imposition of additional liabilities on other Allied Powers, and, where the manufacturing of raw materials is called for, they shall be supplied by the Allied Powers in questions, so as not to throw anyo foreign exchange burden upon Japan¹⁴.

Berdasarkan pasal inilah Negara – Negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melakukan perundingan tentang pampas an perang dengan Jepang yang sekaligus merupakan langkah awal hubungan kembali Negara – Negara Asia Tenggara dengan Jepang. Negara Asia Tenggara pertama yang mengadakan pembicaraan mengenai pampas an perang adalah Indonesia yang datang di Tokyo pada bulan Desember 1951.

¹³ Lawrence Olson, Japan in Postwar Asia, Praeger Publishers, new York – Washington – London, 1970, hal. 13.

¹⁴ Lawrence Olson, Ibid., hal 15 – 16

Perundingan pampas an perang Indonesia – Jepang dimulai pada bulan Desember 1951 di bawah Perdana Menteri Djuanda dan baru ditandatangani pada bulan Januari 1958 oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio. Perundingan yang memakan waktu lama, hampir 7 tahun, terutama disebabkan oleh sikap Jepang yang memandang terlalu banya terhadap tuntutan Indonesia dan ketidakstabilan politik di Indonesia.

Pada penandatanganan ‘Persetujuan Pampasan Perang’ Indonesia – Jepang, Dr. Subandrio, selaku kepala delegasi Indonesia, menyatakan dalam pidatonya, yang antara lain :

We all feel relived and happy with the completion of the Peace Treaty and other Agreements regarding War Reparations, Economic Cooperation and others between the Republic of Indonesia and Japan, especially when we think of the long and winding road we had to follow before arriving at this historic day.

Allow me, at this moment, on behalf of the Indonesian Government to express the highest appreciation and gratitude to those who, since December 1951, have contributed their energy and thoughts towards a resumption of a normal relationship between Indonesia and Japan¹⁵.

II.1. Pembicaraan – Pembicaraan Awal Perundingan, 1951 - 1956¹⁶.

II.1.1. Konferensi Perdamaian San Fransisco, September, 1951.

Konferensi perdamaian San Fransisco memberikan kesempatan kepada Jepang untuk memperoleh kembali posisinya dalam masyarakat internasional setelah pendudukan sekutu. Konferensi ini juga memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengakhiri keadaan perang dengan Jepang. Namun, konferensi ini membangkitkan pertentangan di dalam negeri kedua Negara. Partai sosialis Jepang, partai oposisi terbesar, menuntut politik luar negeri yang netral dan melawan konferensi itu tidak akan membawa perdamaian di Timur Jauh jika Republik Rakyat China tidak diundang, dan bahwa perjanjian perdamaian dikhawatirkan semata – mata mengenai perlindungan kepentingan Amerika Serikat di Pasifik Barat dan dominasinya atas Jepang. Penguasa Indonesia, yang menyatakan politik luar negeri ‘bebas aktif’ juga berpendapat akan kemungkinan suatu konferensi yang

¹⁵ “speech of H.E. Foreign Minister Subandrio” dalam review Jepang, hal 92.

¹⁶ Uraian tentang perundingan pampas an perang Indonesia – Jepang selanjutnya diambil dari Mashashi Nishihara, Op. cit., hal. 36 – 54.

dikontrol oleh Amerika Serikat, dan terjadi debat sengit sebelum Indonesia akhirnya memutuskan mengirimkan delegasi. Iklim politik dalam negeri Indonesia juga kurang menguntungkan atas partisipasinya dalam konferensi, dan khususnya Partai Nasional Indonesia (PNI) menentanginya. Namun, cabinet yang dipimpin oleh Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi, akhirnya memutuskan mengirimkan delegasi pada 24 Agustus.

Amerika Serikat tidak menghendaki diskusi tentang isi Perjanjian Perdamaian pada konferensi itu tetapi hanya menghendaki menggunakannya sebagai tempat penandatanganan perjanjian yang telah dipersiapkan. Hal ini untuk menghindari oposisi blok Komunis yang dikhawatirkan menghambat jalannya konferensi. Pada tanggal 6 Agustus 1951, ketika Indonesia menerima kerangka perjanjian Amerika Serikat (perjanjian perdamaian), menanggapi dengan lima usulan tuntutan, dua diantaranya diteruma. Pertama, perjanjian memuat pasal khusus mengenai pengakuan kedaulatan atas Jepang dan ke dua Indonesia diberi hak menuntut pampasan perang kepada Jepang. Amerika menolak tuntutan Indonesia untuk mengadakan referendum atas wilayah Jepang terdahulu untuk memastikan apakah mereka ingin menjadi bagian dari Jepang. Tuntutan Indonesia ini disampaikan ketika menerima telegram dari rakyat Okinawa tentang keinginannya. Amerika Serikat juga menolak mengundang Republik Rakyat China, dan akhirnya kembali pada tuntutan Indonesia untuk mengadakan debat tentang teks perjanjian.

Indonesia mengakui Republik Rakyat China pada bulan April 1950 dan menyatakan sebagai netralis seperti India dan Birma. Sementara Indonesia sedang mengadakan perdebatan apakah sebaiknya pergi ke San Fransisco, India dan Bima mengumumkan bahwa mereka tidak akan pergi tetapi mereka akan menandatangani perjanjian perdamaian bilateral terpisah dengan Jepang, suatu keputusan yang menekan Indonesia untuk mengikutinya.

Cabinet Sukiman, dalam mempertimbangkan hubungan akrab Indonesia – Amerika Serikat, tidak dapat mengabaikan peranan mutlak yang dimainkan Amerika Serikat di PBB dalam penyelesaian ‘pemindahan kedaulatan’ dari Belanda kepada Indonesia dua tahun yang lalu. Indonesia juga tidak ingin melewatkan suatu kemungkinan menggunakan pengaruh Amerika Serikat untuk memperoleh keuntungan lagi yaitu memperoleh kembali

Irian Barat yang dipersengketakan, dari Belanda. Oleh karena itu, cabinet Sukiman mengirimkan delegasi tetapi hanya memerintahkan untuk menghadiri dan tidak menandatangani perjanjian jika tidak diinstruksikan. Indonesia mencoba menghindari kemungkinan reaksi yang tidak menguntungkan dari India dan Birma, dan pada waktu yang sama berusaha memuaskan Amerika Serikat yang menginginkan partisipasi sebanyak mungkin.

Pada tanggal 6 September komisi eksekutif partai Masyumi, partai mayoritas, memutuskan adanya keuntungan untuk menandatangani perjanjian dengan tujuh belas suara lawan empat belas suara. Hari berikutnya, partai terkuat ke dua PNI, dengan suara bulat melawan penandatanganan perjanjian. Subardjo menelepon Perdana Menteri Sukiman dari San Fransisco, menyarankan cabinet agar mengadakan pemungutan suara untuk penandatanganan perjanjian. Akhirnya, cabinet yang didominasi Masyumi, yang kebetulan mengadakan pertemuan saat itu, mengadakan pemungutan suara untuk penandatanganan, dengan hasil enam belas melawan enam, dengan seluruh menteri dari PNI melawan. Maka Subardjo diperintahkan untuk menandatangani perjanjian dan selanjutnya dilaksanakan.

Kemudian Indonesia menyampaikan pidatonya. Sebelum pidato kepala delegasi Indonesia, Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo, dalam mana dia menyatakan posisi Indonesia dalam perjanjian perdamaian, Indonesia meminta Amerika Serikat untuk membantu Jepang dalam pembayaran pampasan perang. Ali Sastromidjojo, yang kemudian menjadi Duta Besar di Amerika Serikat, mengatakan kepada Dean Rusk, yang kemudian menjadi asisten sekretaris Negara untuk masalah – masalah Timur Jauh, tentang pampasan; kemudian Rusk menyatakan bahwa keputusan mengenai pembayaran pampasan perang bersandar pada Jepang dan menyarankan agar delegasi Indonesia bertemu dengan delegasi Jepang. Amerika Serikat tidak ingin melibatkan diri lebih jauh sebagai penanggung, Amerika Serikat tidak memiliki data berapa banyak kerugian yang diderita Indonesia yang disebabkan selama perang dan berharap Jepang tidak akan harus membayar terlalu banyak sebab akan berarti lebih banyak bantuan yang harus diberikan kepada Jepang oleh Amerika Serikat. Delegasi Jepang nampaknya menolak mengadakan pertemuan, beranggapan bahwa Indonesia seharusnya datang kepada Jepang jika mereka



menginginkan berbicara. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Jepanglah yang seharusnya datang dan berbicara, karena Jepanglah yang berkedudukan di bawah. Namun, mungkin disebabkan tekanan Rusk, perdana Menteri Yoshida Shigeru dan delegasinya mengunjungi delegasi Indonesia di Hotel pada tanggal 5 September. Yoshida menyampaikan persetujuan dari pemerintah Jepang untuk membayar pampasan perang kepada Indonesia tetapi tidak terdapat diskusi tentang jumlah pembayaran baik pada pertemuan ini maupun pada konferensi.

Pada tanggal 6 September di dalam konferensi, Subardjo menyampaikan pidato dalam mana ia menekankan pentingnya pampasan perang Jepang sebagai prasyarat perjanjian perdamaian dengan Jepang. Ia berkata, “. . . pemerintah kami berharap memperoleh kepastian berikut keputusan Perjanjian Perdamaian, yang akan dapat menyelesaikan persetujuan, yang akan menuju kepada perincian lebih luas dari pada yang ditetapkan pada Perjanjian Perdamaian, syarat – syarat dalam mana Jepang akan membayar kerugian perang kepada Indonesia, dan persetujuan mengenai perikanan dan penangkapan ikan”. Dia mengatakan lebih lanjut bahwa tanggapan Jepang “akan sangat mempengaruhi pemerintah kami dalam menentukan posisinya berkenaan dengan penandatanganan perjanjian”. Subardjo kemudian menanyakan secara langsung kepada delegasi Jepang apakah Jepang akan mengadakan perundingan secara terpisah mengenai persetujuan pampasan perang dengan Indonesia untuk menentukan jumlah dan syarat – syarat khusus mengenai pembayaran, segera setelah perjanjian perdamaian ditandatangani. Perdana Menteri Yoshida Shigeru menerima seluruh permintaan Indonesia.

Indonesia berharap Amerika Serikat akan mengawasi pembayaran pampasan perang Jepang kepada Indonesia, Misalnya, duta besar untuk Inggris Subandrio merasa bahwa Amerika Serikat mungkin membantu Indonesia mengamankan pampasan perang dari Jepang seperti membanentang pembayaran hutang perang melalui barang – barang modal, dengan alasan bahwa barang – barang dan industri Jepang sangat diperlukan untuk pemulihan ekonominya sendiri. Jepang memandang tuntutan Indonesia sebesar US. \$ 17,5 milyar sebagai jauh terlalu tinggi, hampir sama dengan GNP Jepang tahun 1952 sebanyak 17,39 milyar dollar Amerika Serikat. Tambahan lagi, pada tahun itu Jepang hanya mempunyai cadangan mata uang asing US. \$ 979 juta, dengan nilai ekspor US. \$ 1.273

juta dan nilai impor US. \$ 2.028 juta. Sebaliknya, pada akhir tahun 1951 Indonesia mempunyai cadangan US. \$ 511 juta dan pada tahun 1952 US. \$ 314 juta. Tuntutan pampasan perang US. \$ 17,5 milyar Indonesia merupakan tindakan yang diambil untuk memperbanyak peredaran uang. Bahkan banyak pemimpin Jepang setuju dengan Wajima Eiji, direktur Biro masalah – masalah Asia dan perunding dengan misi Djuanda yang terkemuka, yang berpendapat bahwa Jepang mestinya tidak harus membayar pampasan perang sebab Jepang tidak pernah secara nyata berperang dengan Indonesia.

Misi Djuanda menemui jalan buntu, setelah peringatan Wajima bahwa Jepang tidak membuat janji tertulis tentang jumlah pampasan perang yang jelas, Ali Sastromidjojo, yang terbang dari Washington untuk membantu misi, kemudian menghubungi kedutaan besar Amerika Serikat di Tokyo. Dia bertemu dengan U. Alexis Johnson, direktur Dinas Masalah – masalah Timur Laut Asia, yang berkata bahwa dia akan membicarakan hal itu dengan Departement Negara dan meminta penelitian kembali proses Perjanjian Perdamaian San Fransisco. Setelah mempelajari bahwa Jepang memang tidak membuat janji tertulis tentang jumlah pampasan tetapi telah menjawab mengiyakan terhadap permintaan Indonesia mengadakan perundingan – perundingan penangkapan ikan dan juga hutang – hutang perang, Jhonson meminta kepada pemerintah Jepang agar terdapat suatu persetujuan, untuk mengimbangi misi yang seolah – olah gagal total. Dia mengundang kedua belah pihak ke tempat tinggalnya pada suatu malam, dan pada tanggal 17 Januari 1952, sebuah persetujuan sementara di tulis sesaat sebelum misi Djuanda meninggalkan Jepang.

Pada tanggal 3 April 1952 Wilopo, anggota PNI, menggantikan Perdana Menteri Sukiman dari Partai Masyumi. Pada tanggal 17 Mei Wilopo menunda sampai waktu yang tak menentu ratifikasi terhadap Perjanjian Perdamaian San Fransisco dan menunda menandatangani persetujuan pampasan sementara yang dibuat oleh misi Djuanda. Dengan demikian misi Djuanda dibubarkan dan perundingan babak pertama berakhir. Kemudian Indonesia secara terpisah mendukung perjanjian perdamaian bilateral mengikuti India dan Birma.

Perlu dicatat bahwa Jhon M. Allison duta besar untuk Jepang dari Tahun 1953 sampai tahun 1956 sementara itu pembicaraan pampasan perang antara Indonesia – Jepang

dalam kemajuan. Dari bulan Februari 1957 sampai Februari 1958, Allison menjadi duta besar di Indonesia. Hal ini mengundang spekulasi bahwa mungkin Allison telah bertindak sebagai mediator antara ke dua belah pihak walaupun dia sendiri menolaknya. Pada tahun 1971 pejabat pemerintah Amerika Serikat di Jakarta mengatakan kepada Masashi Nishihara bahwa dia berpendapat duta besar Allison telah memelihara hubungan akrab dengan ke dua belah pihak¹⁷.

Lima tahun kemudian, dari tahun 1952 sampai 1956, terlihat banyak perubahan selama perundingan antara Jepang dan Indonesia. Pada tahun 1954 Jepang menyelesaikan pembayaran \$200 juta kepada Birma, pada tahun 1956 menyelesaikan pembayaran \$ 550 juta kepada Filipina dan pada tahun yang sama Indonesia mengusulkan penyelesaian \$ 550 juta untuk kerugian perang dan \$ 250 juta berupa pinjaman.

II.1.3. Reinterpretasi Jepang terhadap pasal 14 setelah bulan Oktober 1952.

Selama tahun 1952 terjadi sedikit kemajuan dari perundingan, walaupun Jepang memberikan beberapa konsesi. Pada bulan Oktober, Menteri Luar Negeri Okazaki Katsua menyatakan pada pidato politik luar negeri bahwa pampasan perang Jepang seharusnya dibicarakan pada tingkat politik dan bahwa Jepang akan lebih luwes di dalam member interpretasi terhadap 'the services of Japanese people'. Setelah konsesi ini diumumkan, pada bulan November Wajima Eiji dikirimkan ke Asia Tenggara untuk memutuskan tuntutan pampasan perang Negara – Negara ini, tetapi tidak berhasil.

Pada bulan Oktober 1953 Menteri Luar Negeri Okazaki sendiri pergi ke Manila, Rangoon dan Jakarta. Di samping pemasukan barang – barang modal ke dalam kategori 'services' dan periode pembayaran sepuluh sampai dua puluh tahun dia menawarkan pampasan perang sebesar \$ 250 juta kepada Filipina, \$ 60 juta dollar kepada Birma dan \$ 125 juta dollar kepada Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober sementara di Jakarta, Menteri Luar Negeri Okazaki berbicara dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, yang sekarang menuntut \$ 17,2 milyar. Walaupun nilai yang tepat tidak tercapai, kedua pemimpin ini menyetujui merencanakan perjanjian perdamaian bilateral dan menjadwalkan pembayaran

¹⁷ Teks aslinya, 'in 1971 an American Government official in Jakarta told me that the thought that Ambassador Allison had maintained close contact with both sides.

pampasan perang dalam waktu sepuluh sampai dua puluh tahun. Segera setelah pertemuan ini cabinet Ali Mengirimkan misi yang ke dua ke Jepang. Diketaui oleh Sudarsono, kepala Biro Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, misi ini bertugas meyakinkan kemampuan Jepang untuk menerima tuntutan Indonesia dan mencapai persetujuan sementara tentang bantuan Jepang yang berupa kapal keruk mulai tanggal 2 November dan dipimpin oleh Sudarsono dan Ono Katsumin penasehat pada Kementerian Luar Negeri. Dua minggu kemudian persetujuan sementara dihasilkan dan Sudarsono kembali ke Indonesia pada tanggal 24 November. Pada tanggal 10 Desember Sudarsono kembali ke Jepang untuk menandatangani persetujuan pada tanggal 16 Desember dengan Okumura Katsuzo wakil Menteri Luar Negeri.

Pada tanggal 17 Maret 1954, Diet Jepang meratifikasi persetujuan sementara tentang kapal keruk dan menunggu ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak puas dengan persetujuan ini, dan tidak pernah meratifikasinya. Hal itu menegaskan bahwa jumlah pampasan perang tertentu yang pertama – tama harus diputuskan dan memegang erat tuntutan \$ 17,5 milyar semula.

Dalam pembicaraan Ono-Sudarsono pada bulan November 1953, disetujui bahwa wakil pemerintah Jepang akan dikirim ke Jakarta untuk memelihara hubungan yang lebih akrab dengan pemerintah Indonesia. Wajima Eiji dipilih sebagai utusan khusus untuk merundingkan hubungan diplomatic di masa datang antara Jepang dan Indonesia, dan pergi ke Jakarta pada tanggal 4 Januari 1954. Tugasnya tidak hanya mendiskusikan masalah pampasan perang tetapi juga menyelenggarakan hubungan diplomatic dengan Indonesia.

Wajima meneruskan argumennya bahwa karena Jepang tidak berperang secara nyata dengan Indonesia, Jepang seharusnya tidak harus membayar pampasan perang, dan lagi pula, Indonesia telah mengambil alih pemilikan seluruh benda yang dibawa kembali oleh pemerintah dan rakyat Jepang. Pendirinya adalah bahwa Jepang seharusnya memberikan bantuan sebagai tanda penyesalan terhadap penderitaan mental bukan kerugian fisik yang mungkin telah disebabkan oleh penjajahan Jepang atas rakyat Indonesia selama tiga setengah tahun. Hal ini bukan hanya pendapat Wajima. Walaupun Yoshida pada waktu itu di San Fransisco, telah berjanji bahwa Jepang akan membayar

pampasan perang kepada Indonesia, banyak para pimpinan politik dan bisnis Jepang tidak menyetujui akan keharusan Jepang membayar pampasan perang. Perdana Menteri Yoshida merasa bahwa Jepang seharusnya membayar pampasan perang tetapi tidak tergesa-gesa. Seorang utusan khusus, Ogata Taketora, mengunjungi Asia Tenggara pada musim semi 1952 dan kembalinya mengatakan bahwa Jepang seharusnya mengambil sikap menunggu dan melihat memandangi kawasan politik yang tidak stabil, hal mana lebih baik daripada menyelesaikan masalah pampasan perang dengan segera.

Pada bulan Februari 1953, dinyatakan oleh seorang anggota Diet untuk mempercepat penyelesaian pampasan dengan Asia Tenggara, Perdana Menteri Yoshida menjawab bahwa kerugian dan luka di Asia yang disebabkan oleh peperangan beberapa tahun dengan Jepang tidak dapat diperbaiki dengan segera walaupun keinginan Jepang untuk segera melakukan itu. Jelas Jepang tidak berniat untuk mempercepat penyelesaian. Pemerintah Jepang juga merasa bahwa jika pampasan perang kepada Indonesia segera dibayar pampasan tersebut harus dibayar melalui pinjaman komersial dan penanaman modal privat. Hal ini ditambah pertukaran impor Jepang atas bahan mentah Indonesia akan mengembangkan ekonomi Indonesia dengan teknologi dan modal Jepang. Oleh karena itu Wajima tidak berunding sungguh-sungguh dengan Indonesia kecuali mencoba membujuknya menurunkan tuntutan dari \$ 17,5 milyar. Hal ini, secara tak terduga, menjengkelkan Indonesia dan pada awal tahun 1954 mulai mengadakan penekanan terhadap keperluan tempat tinggal bagi orang Jepang yang hidup di Indonesia dan memberi isyarat akan menolak membayar \$ 16 juta hutangnya kepada Jepang. Pada tanggal 30 Juni ketika Indonesia sungguh-sungguh menyatakan penolakannya, Jepang mulai mempertimbangkan pembatasan impor dari Indonesia. Pada awal Juli Indonesia mengusulkan pembicaraan masalah hutang dagang, dengan demikian kerumitan masalah pampasan perang malahan semakin parah. Iklim politik Indonesia terus tidak stabil dan tidak memungkinkan diskusi yang konstruktif.

Konferensi Asia – Afrika, yang diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955, memberikan kesempatan baru bagi kedua pemerintah untuk mendiskusikan masalah ini. Takasaki Tassunosuke, ketua delegasi Jepang, mengadakan pembicaraan dengan

Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario, yang juga pemimpin PNI. Takasaki menekankan untuk suatu tuntutan pampasan perang yang lebih realistik dengan memandang kondisi ekonomi Jepang. Dia menyatakan bahwa pembayaran Jepang kepada Indonesia akan berada antara Filipina dan Birma. Pada bulan April 1954 Birma telah memutuskan secara terpisah perjanjian perdamaian bilateral dengan Jepang dan telah menyetujui kompensasi sebesar \$ 200 juta, \$ 20 juta setiap tahun selama sepuluh tahun mulai pada bulan April 1955. Perundingan antara Jepang dan Filipina pada waktu itu sedang mendekati persetujuan dimana Jepang akan membayar \$ 550 juta dalam dua puluh tahun.

II.1.4. Tuntutan Indonesia \$ 1 milyar bulan April 1955.

Pembicaraan Takasaki – Sunario mempunyai hasil yang lebih positif setidak – tidaknya bagi Jepang karena Indonesia menurunkan secara drastis tuntutan pampasan dari \$ 17,5 milyar menjadi \$ 1 milyar. Tetapi masih terlalu tinggi bagi Jepang. Indonesia menjadi khawatir tanpa penyelesaian yang dapat dilihat, tanpa hal itu pembangunan ekonominya akan terlambat, dan kemudian kabinet Ali Jatuh. Sementara itu Jepang mengambil sikap menunggu dan melihat karena akan diselenggarakannya pemilu pada akhir September. Perdana Menteri Harahap menyatakan bahwa perundingan – perundingan seharusnya dilanjutkan lagi tanpa menunggu hasil pemilu pada tanggal 29 September dan menahan diri dari tuntutan Indonesia \$ 1 Milyar.

Pada tahun 1955 Menteri Luar Negeri Anak Agung Gde Agung, Anak Agung, menyampaikan proposal pampasan baru kepada kabinet Harahap. Banyak pampasan seharusnya tidak kurang dari tuntutan Filipina dan akan memasukkan hutang dagang Indonesia sebesar \$ 180 juta, juga barang – barang modal senilai \$ 200 juta, barang – barang konsumsi senilai \$ 300 juta, jasa – jasa senilai \$ 50 juta, pinjaman \$ 70 juta, jumlah keseluruhan \$ 800 juta. Sebelum kabinet Harahap dapat memutuskan hal ini, kabinet telah jatuh pada tanggal 26 Maret 1956.

Setelah Jepang membuat persetujuan pampasan perang dengan Filipina pada bulan Mei 1956, Jepang lebih menaruh perhatian pada perundingannya dengan Indonesia. Pada bulan Mei Wajima dan Sukardjo mencoba mendiskusikan cara – cara pembayaran tetapi

tidak ada gunanya karena Indonesia mendesak agar Jepang pertama – tama menyatakan jumlah pembayaran, dimana Jepang tak akan melakukan itu. Pada bulan Juni Wajima dipanggil pulang ke Tokyo untuk mengadakan konsultasi lebih lanjut. Pemerintah Jepang menyusun proposal baru yang akan meletakkan jumlah keseluruhan kira – kira antara Filipina dan Birma, yang akan membayar pampasan perang dalam bentuk barang – barang modal dan jasa – jasa, dan yang mungkin memasukkan hutang dagang Indonesia sebagai bagian dari pembicaraan pampasan perang. Indonesia secara tidak resmi menentukan tuntutan setidak – tidaknya sebanyak pembayaran kepada Filipina. Sekembalinya ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus, Wajima menyatakan bahwa Jepang akan membayar \$ 250 juta dalam penggantian kerugian perang tetapi tidak akan membebaskan hutang dagang Indonesia sebesar \$ 180 juta. Sementara, pada pertengahan Agustus, Menteri Luar Negeri Jepang Shigemitsu Mamoru dan Menteri Luan Negeri Indonesia Roeslan Abdulgani, yang Suez, mengadakan pertemuan tidak resmi. Kemudian, Shigemitsu tidak berjanji dan tidak akan siap mengubah taktik Jepang melambatkan perundingan.

Dalam hal ini, Indonesia menarik tuntutannya sejumlah yang dibayarkan kepada Filipina telah menerima dan membicarakan syarat – syarat \$ 400 juta sampai \$ 500 juta. Masih terdapat banyak perbedaan dalam syarat – syarat pinjaman dan penyelesaian masalah hutang dagang dan bahwa perundingan Wajima dan Karamis, direktur Biro Asia dan Pasifik, tidak terdapat kemajuan. Sementara situasi politik Jepang menjadi kacau karena usaha kontroversial Perdana Menteri Hatoyama untuk membuka hubungan diplomatic dengan Uni Soviet telah menyebabkan pertengkaran di dalam partai yang berkuasa tentang siapa yang seharusnya menjadi penggantinya. Wajima terpaksa menunda pembicaraan pampasan perang sampai cabinet baru terbentuk. Akhirnya pengganti Hatoyama terpilih, Ishibashi Tahzan, dan dia memilih cabinet baru pada tanggal 23 Desember 1956. Disebabkan oleh sakit yang mendadak, Menteri Luar Negeri Kishi Nobosuke menggantikan Isnibashi pada tanggal 25 Februari 1957 dan dengan pemunculan Kishi sebagai Perdana Menteri, prospek pembicaraan pampasan perang menjadi lebih cerah.

II.2. Kishi dan Persetujuan Pampasan Perang 1956.

Pemerintahan Kishi mengambil sikap yang lebih sungguh – sungguh terhadap masalah pampasan perang dari pada pemerintahan yang lalu. Pentingnya peningkatan hubungan Jepang dengan Asia Tenggara sering diperdebatkan di dalam dan di luar kalangan pemerintah, bahkan sekarang Jepang telah membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Uni Soviet dan telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa – bangsa, suatu saat yang nampaknya telah masak untuk membuat perdamaian dengan Indonesia.

Jepang masih mempertimbangkan hubungannya dengan Asia hanya sebagai kepentingan yang ke dua, memandang hubungannya dengan Amerika Serikat sebagai yang mana penting untuk pertahanan dan juga ekonominya. Tetapi untuk memperkuat posisi Jepang menghadapi Amerika Serikat, Kishi memandang perlu memperbaiki hubungan diplomatic dan memperluas kehadiran Jepang di Negara – Negara Asia yang lain. Pasar potensial yang besar di Indonesia bagi barang – barang ekspor Jepang juga sumber – sumber alamnya tetap merupakan daya tarik besar bagi Jepang. Tahun 1956 Indonesia telah mengumpulkan hutang dagang kepada Jepang sebesar \$ 180 juta, dan merupakan kepentingan Jepang menyelesaikan hutang ini dan mempromosikan ekspornya.

Pada tahun 1957 Indonesia Nampak mempunyai keinginan seperti Jepang untuk menyelesaikan masalah pampasan perang. Kemerosotan ekonomi Indonesia karena pemerintah mempergiat kampanye anti – Belanda guna kepentingan klaim Irian Barat. Mata uang asingnya telah merosot dari \$ 511 juta pada tahun 1951 menjadi \$ 255 juta pada tahun 1956. Pada tahun 1957 hanya Indonesia dan Vietnam Selatan yang belum menyelesaikan pampasan perang dengan Jepang. Tidaklah merupakan keuntungan bagi Indonesia memperlama perundingan – perundingan ini dan menunda penggunaan pampasan perang. Oleh karena itu, pada tahun 1957 pembicaraan mulai lagi walaupun perasaan keadaan mendesak Indonesia telah melemahkan posisi tawar – menawarnya.

II.2.1. \$ 200 juta Jepang melawan \$ 400 juta Indonesia dan Misi Winoto, Januari – Juli 1957.

Pada tanggal 16 Januari 1957 Perdana Menteri Ali sepakat dengan Wajima bahwa perundingan resmi akan dimulai/diselenggarakan pada tingkat menteri. Pada tanggal 5 Februari Wajima mengajukan kepada pemerintah Indonesia tawaran pampasan perang \$

200 juta dan \$ 100 juta sebagai pengganti hutang Indonesia, \$ 500 juta untuk kerja sama ekonomi non pemerintah, ditambah \$ 70 juta dalam bentuk pinjaman pemerintah. Hari berikutnya Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbangi dengan tawaran \$ 300 juta untuk pampasan perang, \$ 110 juta untuk pengganti hutang dagang, \$ 500 juta dalam bentuk bantuan ekonomi, dan \$ 60 juta berupa pinjaman. Pada tanggal 26 Februari Perdana Menteri Ali membuat proposa yang sama dengan proposal Kementerian Luar Negeri, kecuali satu, dia menurunkan bantuan ekonomi menjadi \$ 400 juta. Wajima tidak menerima \$ 300 juta untuk pampasan perang dan tetap pada tawaran semula \$ 200 juta. Pada tanggal 8 Maret Perdana Menteri Ali merubah proposalnya menjadi \$ 250 juta untuk pampasan perang dan \$ 450 juta dalam bentuk kerja sama ekonomi, tetapi pada tanggal 13 Maret cabinet Ali Jatuh.

Cabinet baru terbentuk pada tanggal 9 Aprilm diketuai oleh Djuanda Kartawidjaja dengan Subandrio sebagai Menteri Luar Negeri. Cabinet Djuanda, yang mengadakan pertemuan pertama pada tanggal 3 Mei 1957, menyetujui proposal yang diajukan oleh cabinet yang lalu pada tanggal 8 Maret. Karena penandatanganan mendapat perlawanan yang luas dari luar kalangan cabinet, bagaimanapun, cabinet Djuanda akhirnya memutuskan meneliti kembali proposal dan memanggil kembali dari Tokyo konsul Jenderalnya, Iskandar Ishak. Pada tanggal 2 juli masih proposal yang lain dipermasalahkan : proposal ini menuntut \$ 400 Juta untuk pampasan perang dan \$ 400 juta untuk bantuan ekonomi yang akan memasukkan hutang dagang Indonesia kepada Jepang. Proposal ini menyajikan kembali peningkatan \$ 100 juta disbanding dengan proposal yang lalu. Ishak kembali ke Tokyo pada tanggal 8 juli dan pada tanggal 13 juli menyampaikan proposal Djuanda kepada Perdana Menteri Kishi. Pemilihan cabinet Djuanda tidak melibatkan partisipasi partai – partai politik Indonesia, yang pada kesempatan yang lalu telah menyerahkan daftar calon untuk anggota cabinet. Saat ini menteri – menteri dalam cabinet Djuanda telah dipilih oleh Presiden Sukarno sendiri dalam usaha mengokohkan kekuasaannya. Walaupun Perdana Menteri Djuanda memiliki pengetahuan luas dan pengalaman perencanaan ekonomi, Presiden Sukarno memutuskan menangani sendiri masalah pampasan perang. Dia menyampaikan masalah ini kepada Dewan Nasional, yang telah dibentuk pada tanggal 12 juli 1957 sebagai lembaga penasehat kebijaksanaan cabinet.



Tetapi dengan Presiden Sukarno sebagai ketuanya, dewan ini menjadi lebih kuat dari pada cabinet. Presiden Sukarno mempelajari kedua belah pihak Jepang dan Indonesia dan mengajukan proposalnya sendiri dan memerintahkan Roeslan Abdugani, wakil ketua dan yang lain untuk mendiskusikan proposal tersebut dengan pemimpin – pemimpin partai. Setelah dewan itu mengesahkan proposalnya, proposal itu dikirimkan ke cabinet.

Kedudukan Wajima Eiji sebagai ketua perunding masalah pampasan perang digantikan oleh Takagi Hiroichi pada akhir juli, konsul Jenderal baru untuk Indonesia. Sebelumnya Takagi telah membantu dari tahun 1955 sampai tahun 1957, sebagai Kepala Bagian Pampasan Perang dan Biro Masalah – masalah Asia pada Kementerian Luar Negeri dan telah menangani pembayaran pampasan perang kepada Birma dan Filipina. Setelah kehadirannya di Jakarta, Takagi memulai perundingan dengan gaya tersendiri, mengetahui bahwa masih terdapat perbedaan diantara pemimpin – pemimpin Jepang apakah seharusnya membayar pampasan perang kepada Negara ini dimana Komunis sedang memegang kekuasaan. Walaupun jamuan dingin diberikan kepadanya oleh surat – surat kabarm Takagi mengetahui sikap menguntungkan Jepang di antara rakyat Indonesia, memutuskan bahwa penyelesaian cepat masalah pampasan perang akan menjadi keuntungan bagi kegiatan ekonomi Jepang pada masa yang akan datang di Indonesia, dan mendorong pemerintahannya mempercepat pembuatan keputusan.

Enam tahun setelah Konferensi Perdamaian San Fransisco dimana Yoshida telah menjanjikan membayar pampasan perang kepada Indonesia, Jepang masih belum memutuskan apakah akan membayar atau tidak. Ketidakpastian ini, memperlama jalan ke luar masalah pampasan perang yang dikhawatirkan oleh Presiden Sukarno, yang cemas akan tumbuhnya perasaan anti – Jepang, yang akan membuat proses perundingan semakin sulit. Dia mencari bentuk kompromi dengan Jepang dan secara diam – diam mengirimkan utusan khususnya ke Tokyo, Winoto Danuasmoro, sekretarisnya, Elkana Tobing, kemudian menjadi penasehat resmi Partai Nasional Indonesia, dan Adam Malik, kemudian menjadi presiden kantor berita Antara. Mereka diperintahkan mendiskusikan satu formula atau syarat – syarat pembayaran dengan pemimpin – pemimpin Jepang terkemuka dalam pemerintahan, bisnis dan kalangan industriawan. Keberhasilan hubungan yang dilaksanakan oleh para utusan presiden meyakinkan Jepang akan pentingnya

penyelesaian secara tepat, dan para utusan itu melaporkan kepada Presiden bahwa Jepang mau membayar pampasan perang sesuai dengan kekuatan ekonominya. Dengan tambahan dorongan Takagi dan tekanan dari sumber – sumber lain, Jepang mulai bergerak menuju penyelesaian. Dalam hal ini, peranan penting sekali yang dimainkan oleh tiga utusan itu dalam sejarah perundingan pampasan perang kedua bangsa seharusnya diberi penghargaan yang layak. Pada tanggal 18 September 1957 Menteri Luar Negeri Subandrio berhenti di Tokyo dalam perjalanan menghadiri Sidang Umum PBB di New York dan berbicara dengan Perdana Menteri Kishi, menekankan dampak psikologis pampasan perang Jepang pada bangsa Indonesia dan menyebutkan kepentingannya yang semakin berkembang akan kemajuan teknologi industry Jepang. Dalam menanggapi Kishi mengharap diselenggarakannya pertemuan puncak untuk mendiskusikan masalah itu dan meminta agar Presiden Sukarno berkunjung ke Jepang.

II.2.2. Proposal Kobayashi dan Kunjungan Hatta ke Tokyo, September – Oktober 1957.

Setelah kunjungan Subandrio ke Tokyo, Kementerian Luar Negeri memerintahkan Kobayashi Ataru, seorang usahawan terkemuka, untuk pergi ke Asia Tenggara sebagai utusan pribadi Perdana Menteri Kishi untuk menilai kondisi ekonomi dan politik wilayah itu. Sebelum rombongan Kobayashi datang, Shirahata Tomoyoshi, penasehat pada Biro Masalah Asia dan bekas konsul di Surabaya dan Jakarta selama 1952 – 1953, secara rahasia pergi ke Jakarta dengan Takagi untuk mencari cara – cara menarik Kobayashi kepada masalah pampasan perang dengan Indonesia.

Shirahata nampaknya cukup memiliki kepekaan politik yang baik untuk menunda birokrasi, mungkin bagian dari pengalamannya sebagai sekretaris Perdana Menteri dari tahun 1953 sampai 1955. Dalam hal lain, dia seharusnya dipercaya merencanakan kunjungan Kishi dan pekerjaan Kobayashi cukup memuaskan. Juga Shirahata yang pertama berpendapat memilih Kobayashi untuk menangani masalah pampasan perang. Sebagai pengganti berbicara langsung dengan Kobayashi, Shirahata berukar pendapat dengan usahawan berpengaruh yang lain, Ishihara Hiroichiro, yang selanjutnya berkonsultasi dengan usahawan yang ke tiga, Matsunaga Yasuzaemon. Matsunaga dipandang sebagai seorang anggota senior dunia usaha, bertanggung jawab rekonstruksi secara cepat administrasi tenaga listrik Jepang. Juga dia yang akhirnya menyarankan

Kobayashi untuk pergi ke Asia Tenggara membantu pelaksanaan politik luar negeri di kawasan ini. pada saat Kobayashi telah membuat keputusan, Shirahata terbang ke Indonesia menyusun cara – cara yang melibatkannya dalam perundingan pampasan perang.

Pada tanggal 22 September Kobayashi hadir di Jakarta tanpa menduga untuk merundingkan pampasan perang. Takagi dan Shirahata mengajak Kobayashi segera ke rumah hangat konsul jenderal Jepang di Selatan Jakarta, dimana mereka mencoba membujuknya bahwa misinya tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa mendiskusikan masalah pampasan perang, duta besar Amerika Serikat, Jhon Allison, juga diundang, dan dia menekankan pentingnya pembayaran pampasan perang Jepang kepada Indonesia. Menurut Takagi, Allison menunjukkan bahwa kekuatan – kekuatan Komunis tidak menduduki kedudukan yang berarti dalam politik Indonesia. Allison juga menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Jepang seharusnya bersama – sama membantu pembangunan ekonomi Indonesia, walaupun dia menambahkan bahwa hal ini sebaiknya tidak diberitahukan kepada Indonesia.

Yakin akan hal itu, Kobayashi cepat – cepat menyusun proposal hutang dagang Indonesia sebesar \$ 177 juta kepada Jepang. Proposalnya meliputi pengumpulan hutang ini dalam dollar selama periode dua puluh tahunan dengan bunga 3 persen setahun, sebuah rencana yang nampaknya memuaskan kedua belah pihak Jakarta dan Tokyo. Kobayashi juga mengusulkan \$ 200 juta dibayar dalam pampasan perang selama sepuluh tahun pertama dan \$ 400 juta diperluas sebagai kerjasama ekonomi oleh kelompok swasta Jepang selama sepuluh tahun setelah pembayaran pampasan perang lunas. Perdana Menteri Djuanda mempertimbangkan proposal Kobayashi dengan ‘bijaksana dan praktis’, karena perluasan pembayaran kepada Indonesia dalam dua puluh tahun akan meringankan beban Jepang. Kementerian Keuangan Jepang menentang pendapat membatalkan hutang dagang melalui pampasan perang dan telah menekankan hutang dalam dollar seperti diusulkan Kobayashi, mata uang asing Jepang akan ditingkatkan sementara bunga 3 persen akan menambah setidaknya – tidaknya \$ 30 juta di luar hutang itu sendiri.

Kobayashi, Takagi dan Shirahata berpendapat bahwa persetujuan pampasan perang segera akan diakhiri berdasarkan proposal Kobayashi. Ketika Kobayashi kembali ke Tokyo pada tanggal 11 Oktober, dia melaporkan kepada Menteri Luar Negeri Fujiyama Aichiro

bahwa Indonesia siap mengadakan perundingan secara sungguh – sungguh. Jepang diberitahu bahwa Mohammad Hatta, bekas wakil Presiden yang masih berpengaruh akan mengunjungi Tokyo pada pertengahan Oktober, dan pemerintah Jepang mempersiapkan hasil persetujuan pampasan perang.

Kunjungan Hatta ke Jepang yang berlangsung dari tanggal 16 sampai 29 Oktober, dianggap kunjungan pribadi karena dia telah mengundurkan diri dari kedudukan pemerintahannya sebagai wakil Presiden pada bulan Desember 1956. Yang bertanggung jawab atas pengunduran diri Hatta adalah perbedaan besar antara dia dan pasangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan, Presiden Sukarno. Terdapat beberapa usaha penyesuaian dan pada bulan September 1957 ketika Musyawarah Nasional Pembangunan mengadakan rapat, Hatta dan Sukarno nampaknya terdapat persesuaian. Pada akhir musyawarah mereka menandatangani pernyataan bersama memuji ‘Revolusi Indonesia’, tetapi ternyata hanya berpura – pura. Sukarno dipastikan tidak memberikan kekuasaan politik yang nyata, dan Hatta akhirnya tidak tahan ‘membiarkan Sukarno berjalan dengan caranya’. Sebelum panitia Sembilan, yang dipilih dengan musyawarah, mampu menciptakan hubungan kerja antara dua pemimpin itu, Hatta telah mengadakan perjalanan ke Peking dan kemudian singgah di Tokyo.

Pada tanggal 12 Oktober 1957, sesaat sebelum kehadiran Hatta, Sudjono, direktur Biro Asia dan Pasifik, dan Djanaman Adjam, pejabat senior yang bertanggung jawab atas masalah pampasan perang pada Kementerian Luar Negeri, juga dikirim ke Tokyo oleh Perdana Menteri Djuanda. Ketika Perdana Menteri Kishi, Menteri Luar Negeri Fujiyama dan Itagaki, direktur Biro Masalah – masalah Asia berbicara dengan Hatta, dia menyetujui bentuk – bentuk dasar proposal Kobayashi. Tapi tidak nampak bahwa Hatta dapat bekerja sejalan dengan Sudjono dan Adjam yang telah menyatakan ketidakpuasan dengan proposal itu. Dalam keadaan putus asa, Hatta meninggalkan Jepang dan tak lama setelah itu Sudjono dan Adjam berangkat pulang, juga tak mencapai apapun. Di desas – desuskan di Jepang, bahwa karena Sukarno tidak ingin Hatta memperoleh nama baik melalui persetujuan pampasan perang dan kemudian dikirim Sudjono dan Adjam untuk menggagalkan perundingan. Hal ini merupakan salah satu tanda konflik antara Sukarno dan Hatta terlihat dalam masalah – masalah diplomatic.

II.2.3 Kunjungan Kishi, November 1957.

Dalam keadaan kurang mampu mendalami Indonesia, Perdana Menteri Kishi ingin mencoba proposal Kobayashi lagi dan mengirimkan Kobayashi kembali ke Jakarta. Kishi memilihnya berdasarkan bahwa dirinya merasa kurang mampu menghadapi lawan politiknya Ikeda Hayato, yang mencela ketidak mampuannya menangani masalah itu. Diketahui bahwa Kobayashi memihak Ikeda dan Kishi berpendapat mungkin Kobayashi dapat membantu mengendalikan lawannya terhadap akibat – akibat yang mungkin terjadi kemudian. Kemudian Kobayashi menyatakan bahwa Kishi secara pribadi tidak akan dipaksa bertanggungjawab atas kemungkinan kegagalan perundingan. Dia ditemani oleh Sekretarisnya Mizuno Sohei, dan Nishijima Shigetada, analisis politik masa perang dari angkatan laut, dan dibantu oleh Shirahata Tomoyoshi dan Tsurumi Kiyohiko, yang telah menjadi konsul di Jakarta. Rombongan Kobayashi datang di Jakarta pada tanggal 25 November, sehari sebelum PM. Kishi merencanakan berkunjung untuk memudahkan pembicaraan tingkat puncak Kishi dengan pemimpin – pemimpin Indonesia.

Pada tanggal 17 November, diselenggarakan pertemuan antara Kishi, Kobayashi, dan Ichimada Hisato, Menteri Keuangan Jepang. Mereka sepakat bahwa politik Jepang akan mengikuti proposal Kobayashi \$ 200 juta untuk pampasan, \$ 200 juta untuk pinjaman jangka panjang dan \$ 400 juta untuk bantuan ekonomi. Sebelumnya Ichimada menentang pembatalan hutang dagang dalam dalam perundingan pampasan perang, tetapi sekarang ia menyetujuinya, sebab dia berpendapat bahwa pengumpulan hutang dagang dari suatu Negara yang kekurangan mata uang asing hanya akan menciptakan masalah baru dan mempersulit masalah tersebut. Walaupun Kishi menentang pembatalan dengan mengatakan bahwa Jepang harus mengubah kedudukannya pada taraf ini. sebelum Kishi berangkat ke Indonesia, Kawashima Shojiro, sekretaris partai yang berkuasa, mengumumkan pada tanggal 18 November bahwa pemerintah Kishi tidak harus menyelesaikan masalah pampasan perang yang ‘sangat sulit’ (at any cost) selama kunjungan Kishi, ditambahkan bahwa Kishi telah diberi kekuasaan menyusun persetujuan dengan Indonesia jika hal itu harus segera selesai. Pernyataan ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar – menawar Kishi dan Kobayashi sebelum pembicaraan dimulai.

Di samping misi resmi Kobayashi untuk menyelesaikan masalah pampasan perang, dia dan Nishijima ingin menilai situasi dalam negeri Indonesia. Dalam perjalanan ke Jakarta pada bulan November, mereka berhenti di Singapura dimana mereka secara rahasia menjumpai ES. Pohan, seorang pemimpin kelompok Sumatera, untuk menjelaskan bahwa pampasan perang Jepang dipergunakan untuk semua rakyat Indonesia dan tidak diperuntukkan khusus kelompok Sukarno atau kelompok Sumatera, seperti diduga. Sejak akhir tahun 1956, militer dan kekuatan – kekuatan politik luar Jawa mulai mengkritik pemerintahan Sukarno secara terbuka, dan kurang perhatiannya kepada daerah – daerahnya. Mereka tidak menyetujui kecenderungan kiri Sukarno dan pada bulan Desember 1956 kekuatan – kekuatan ini membentuk sebuah dewan merdeka yang diberi nama Dewan Banteng. Dewan ini secara bertahap memobilisir dukungan daerah dan luar negeri, hubungan luar negeri mereka diselenggarakan di Singapura melalui Pohan.

Menjelang kehadiran di Jakarta pada tanggal 22 November 1957 beberapa hari sebelum Kobayashi dan Kishi, dari seorang kenalan yang menjadi konsul di Surabaya dan Jakarta bahwa Shirahata diberitahu secara rahasia adanya gerakan anti – Kishi, tetapi Shirahata berhasil mencegahnya mengadakan kampanye terbuka anti – Kishi. Kampanye terbuka itu disponsori oleh anggota – anggota partai radikal Murba. Konsul Jenderal Takagi menentanginya, tetapi Shirahata menghilang ‘istirahat’ (for a rest), dan berhasil mencegah baik kampanye anti – Kishi maupun anti – Sukarno.

Shirahata juga diberi tahu secara rahasia bahwa dalam satu minggu pemerintah Indonesia mungkin memutuskan hubungan diplomatic dengan Belanda disebabkan oleh masalah Irian Barat. Informasi ini, juga, mungkin berhubungan dengan masalah pampasan perang, oleh karena itu Shirahata meneruskannya kepada Kobayashi dan Kishi, yang memutuskan membatasi pembicaraan mereka dengan Sukarno kepada suatu diskusi penyelesaian secara luas. Hasil pembicaraan Kishi – Sukarno diumumkan pada tanggal 28 November melalui pernyataan resmi, seperti akan terlihat kemudian. Pada tanggal 1 Desember, seperti diduga, Sukarno mengumumkan langkah – langkah ekonomi mendasar untuk melawan Belanda termasuk pemboikotan operasi pelayaran Belanda di wilayah Indonesia.

Kobayashi datang di Indonesia pada tanggal 25 November dan Kishi pada hari berikutnya. Pada tanggal 26 November cabinet Indonesia mengadakan rapat mendiskusikan proposal Kobayashi terakhir. Setelah pertemuan itu Menteri Penerangan Sudibjo mengumumkan bahwa pembicaraan antara PM. Djuanda dan PM. Kishi yang diselenggarakan pada tanggal 27 November akan tidak resmi. Rombongan Kishi dan Kobayashi bertemu dengan PM. Djuanda pada tanggal 27 November untuk mendiskusikan proposal Kobayashi. Walaupun kedua pihak telah menjadwalkan bertemu Sukarno pagi harinya, Sukarno tiba – tiba meminta secara pribadi, suatu pertemuan tertutup hanya dengan Kishi. Hanya Takagi sebagai penterjemahnya, menemaninya.

Dalam pertemuan ini Sukarno menyatakan bahwa Indonesia menginginkan Jepang membayar pampasan perang \$ 400 juta dan \$ 400 juta sebagai bantuan ekonomi. Semua berjumlah \$ 800 juta sama dengan yang dibayarkan kepada Filipina (\$ 550 juta pampasan perang dan \$ 250 juta berupa pinjaman). Kishi menolak, mengatakan bahwa Jepang tidak dapat membayar lebih banyak dari \$ 200 juta, sejumlah yang dibayarkan kepada Birma. Sukarno kemudian menyatakan bahwa pampasan perang tertulis \$ 400 juta tetapi jumlah yang sebenarnya adalah \$ 400 juta dikurangi \$ 170 juta hutang Indonesia (hutang dagang). Takagi tidak menyetujui sebab sejumlah itu, \$ 230 juta, akan melebihi estimasi Jepang \$ 200 juta dengan \$ 30 juta. Bagaimanapun formula pengurangan hutang dagang dari pampasan perang yang tertulis \$ 400 juta yang diusulkan Sukarno merupakan apa yang diharapkan Kishi. Takagi berusaha menunjukkan bahwa karena \$ 170 juta hutang – hutang dagang itu sebenarnya berjumlah kira – kira \$ 240 juta termasuk bunganya, pampasan perang seharusnya \$ 160 juta (\$ 400 juta dikurangi \$ 240 juta, tidak \$ 400 juta dikurangi \$ 170 juta). Kishi menolak saran Takagi, menyatakannya sebagai soal kecil. Pembicaraan Kishi – Sukarno berakhir dengan konsesi Kishi \$ 30 juta untuk pampasan perang dan dengan pembatalan hutang dagang Indonesia. Sukarno telah menyatakan lebih awal bahwa dia akan menyelesaikan masalah pampasan perang dan rupanya benar.

Agenda kunjungan Kishi tidak jelas. Tujuan kunjungan yang dinyatakan adalah kepentingan persahabatan, tetapi semua tahu bahwa masalah pampasan perang adalah tujuan yang nyata. Untuk memelihara permukaan, Presiden Sukarno tidak hadir di lapangan terbang pada kehadiran Kishi, pertemuannya dengan Kishi kemudian diistilahkan

hanya kunjungan budi baik (Persahabatan), dan pembicaraan pampasan perang dicatat sebagai informal. Komunikasi bersama yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Djuanda dan Perdana Menteri Kishi pada tanggal 28 November, sebelum keberangkatan Kishi, tidak mengumumkan jumlah pampasan perang Jepang dan pinjaman – pinjaman kepada Indonesia; bahkan tidak menyatakan bahwa penyelesaian akhir telah dibuat. Hanya menyatakan bahwa mereka ‘akhirnya mencapai saling pengertian pada prinsip – prinsip dasar penyelesaian’. Kobayashi tetap tinggal di Jakarta meneruskan perundingan – perundingan ‘untuk mencapai kesimpulan segera tentang persetujuan pampasan perang’ dan ‘untuk penyelenggaraan awal hubungan diplomatic yang wajar’. Hanya beberapa hari kemudian pers dan masyarakat mendengar bahwa Kishi dan Sukarno memang telah menyelesaikan pampasan perang sebesar \$ 230 juta. Menurut surat kabar Indonesia, pemerintah Jepang telah menyetujui sepenuhnya hasil itu pada tanggal 1 Desember, dan pada gilirannya, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Hardi juga telah menyetujuinya. Dengan demikian proposal Kobayashi telah menjadi tak berharga, membuat seluruh kerja berat yang dilakukan oleh Kobayashi, Shirahata, Takagi, dan Nishijima sejak bulan September tidak diperlukan.

Bila dipandang dari segi bargaining jumlah pampasan perang, Indonesia nampak terlalu banyak member konsesi. Dari tuntutan semula sebesar \$ 17,5 milyar dan tawaran Jepang sebesar \$ 200 juta, berakhir dengan kesepakatan \$ 230 juta.

Pada akhirnya jumlah pampasan perang itu, setelah diperhitungkan secara teliti dengan hutang – hutang dagang Indonesia menjadi \$ 223.080.000. kondisi ini nampak mencerminkan keuntungan diplomatic Jepang.

Dari proses perundingan pampasan perang ini, Jepang dapat dikatakan memperoleh keuntungan dua arah. Pertama, Jepang berhasil menciptakan suasana bersahabat dengan Indonesia yang dipandang merupakan sumber bahan baku bagi industrinya. Keadaan ini sekaligus mengurangi ketergantungannya kepada Amerika Serikat, bahkan memperkuat diplomasinya menghadapi Amerika Serikat itu sendiri. Ke dua, Jepang, secara diplomatic, berhasil melunakkan istilah yang bertekanan pada ‘pampasan perang’ menjadi istilah yang lebih bertekanan pada ‘bantuan ekonomi’ dan ‘kerja sama ekonomi’. Hal ini dapat mempengaruhi posisi internasional Jepang setingkat lebih tinggi dari Indonesia, karena